

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

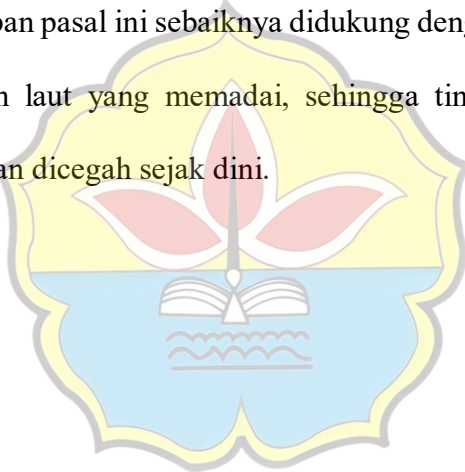
1. Sanksi pidana atas pembajakan kapal di wilayah perairan Indonesia telah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam KUHP Pasal 438–479 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Regulasi tersebut mencakup tindakan pembajakan yang terjadi di berbagai perairan, termasuk laut lepas dan sungai, serta memuat pengaturan mengenai peran pelaku baik sebagai nakhoda, anak buah kapal, maupun penumpang. Secara khusus, Pasal 438 dan Pasal 439 KUHP menjadi ketentuan sentral dalam menjerat pelaku pembajakan kapal di wilayah hukum Indonesia.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Mpw, Pengadilan Negeri Mempawah memutuskan bahwa dakwaan Pasal 439 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini menegaskan peran penting pasal tersebut sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi keamanan maritim dan menindak tegas pelaku pembajakan kapal. Dari sudut pandang penegakan hukum, putusan ini menjadi preseden penting bagi upaya menjaga keselamatan pelayaran dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

B. Saran

1. Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan kapal, diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum laut, seperti TNI AL, Polair, dan KPLP, serta pembaruan regulasi yang

menyesuaikan perkembangan modus kejahatan maritim. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum maritim, termasuk pelatihan teknis, perlu dilanjutkan agar penerapan Pasal 438 dan 439 KUHP optimal.

2. Mengingat pentingnya Pasal 439 ayat (1) KUHP dalam melindungi keamanan maritim, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada aparat penegak hukum, pelaku industri pelayaran, dan masyarakat pesisir mengenai ancaman serta sanksi hukum terhadap pembajakan kapal. Selain itu, penerapan pasal ini sebaiknya didukung dengan penggunaan teknologi pemantauan laut yang memadai, sehingga tindakan pembajakan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers ,Jakarta, 2011.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Bahder Johan Naustion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika Kondisi Riil dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2000.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hasil Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2015.
- I Wayan Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, 2009.
- M. Natsir Anawi, *Putusan Hakim*, Uji Press, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, 2010.

- _____, *Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, 2012.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Marwan SM. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, PT. Karya Nusantara, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet. I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* , Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Soesilo. R, *RIB/HIR*, PT. Karya Nusantara, Bogor, 1989.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh* , Liberty, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supar tinah, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap*

Kebenaran Formil, Laporan Penelitian Bagian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Wildan Sayithi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013.

William A. Schabas, David Armstrong, (Ed). *International crime*, Routledge Handbook of International Law, Taylor & Francis e-Library, United Kingdom. 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

C. Website

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.pn-mempawah.go.id/pages/2015-02-02-15-05-34/sejarah-pengadilan-dan-wilayah-hukum>

